

# EFEKTIVITAS PROGRAM EKOSISTEM KEUANGAN INKLUSIF (EKI) OJK PROVINSI NTT DALAM UPAYA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI PEDESAAN NTT (STUDI KASUS DI DESA BINAAN OEFETO KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

*Effectiveness Of The Inclusive Financial Ecosystem (EKI) Program Of The OJK In NTT Province In Efforts To Increase Financial Inclusion In Rural NTT (Case Study in Oefeto's Guide Village, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province)*

Putry Gratia H. Kale Lado<sup>1,a)</sup>, Petrus E. de Rozari<sup>2,b)</sup>, Christien C. Foenay<sup>3,c)</sup>, Paulina Y. Amtiran<sup>4,d)</sup>

<sup>1,2,3,4)</sup>Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : <sup>a)</sup> putrykalelado@gmail.com, <sup>b)</sup> petrus.rozari@staf.undana.ac.id,  
<sup>c)</sup> christien.foenay@staf.undana.ac.id, <sup>d)</sup> paulinaamtiran@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK

Inklusi keuangan merupakan satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah pedesaan yang sering kali terpinggirkan dari akses layanan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Program EKI oleh OJK Provinsi NTT untuk meningkatkan inklusi keuangan di Desa Oefeto. Program EKI yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dirancang untuk menjawab permasalahan terbatasnya akses layanan keuangan formal, rendahnya literasi keuangan, serta tingginya ketergantungan masyarakat pada praktik pinjaman informal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program EKI dinilai relatif efektif berdasarkan lima indikator efektivitas, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, serta pencapaian tujuan. Program ini berhasil memperluas akses keuangan formal serta mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan lembaga keuangan formal. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Program EKI tidak hanya memberi dampak positif jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan dalam membangun ekosistem keuangan inklusif berbasis potensi lokal.

**Kata Kunci** : Efektivitas program, Inklusi Keuangan, OJK, Ekosistem Keuangan Inklusif

## PENDAHULUAN

Akses perbankan di desa seringkali terhambat oleh beberapa faktor. Seperti jarak yang jauh ke kantor bank, infrastruktur yang kurang memadai, dan biaya transaksi yang tinggi (Ghosh, 2020). Menurut Rohmayanti et al., (2021), minimnya keberadaan kantor cabang bank di daerah pedesaan membuat masyarakat kesulitan untuk melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Data dari World Bank (2021) menunjukkan bahwa sekitar 97,7 juta orang dewasa di Indonesia, masih belum memiliki akses ke layanan perbankan. Masyarakat juga tidak

memahami produk dan layanan keuangan, sehingga mereka cenderung ragu untuk menggunakan jasa keuangan (Fuadah et al., 2023). Akses terhadap layanan keuangan ini termasuk dalam inklusi keuangan.

Inklusi keuangan merupakan satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah pedesaan yang sering kali terpinggirkan dari akses layanan keuangan. Inklusi keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memastikan akses terhadap produk dan layanan keuangan bagi kelompok-kelompok rentan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup (Suryaningrum et al., 2023). Salah satu aspek penting dari inklusi keuangan adalah upaya untuk meningkatkan peran sektor keuangan dan perekonomian masyarakat (Septiani & Wuryani, 2020). Pentingnya inklusi keuangan terletak pada kenyataan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hidup mereka (Yusri et al., 2022).

**Tabel 1.**

Perbandingan Tingkat Inklusi Keuangan Berdasarkan Strata Wilayah di Indonesia

		2019	2022
Inklusi Keuangan	Perkotaan	83,60%	86,73%
	Pedesaan	68,49%	82,69%
	Gap	15,11%	4,04%

Sumber: SNLIK Tahun 2022 (OJK, 2022)

Berdasarkan Tabel 1. perbandingan diatas, indeks inklusi keuangan berdasarkan strata wilayah menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di wilayah pedesaan mengalami peningkatan yang lebih signifikan dari tahun 2019 ke 2022. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2022 menjangkau 34 provinsi yang mencakup 76 Kabupaten/Kota, diketahui terdapat *gap* antara hasil survei masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat perkotaan memiliki nilai indeks literasi dan inklusi keuangan sebesar 50,52% dan 86,73%, sementara untuk indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat pedesaan adalah 48,43% dan 82,69% (OJK, 2022).

Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam hal literasi dan inklusi keuangan. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) pada tahun 2023. Program ini dirancang untuk memperluas akses keuangan formal di wilayah pedesaan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga jasa keuangan, akademisi, media, dan komunitas. Program EKI di pedesaan akan mengoptimalkan potensi alam, budaya, dan ekonomi dengan memberikan akses dari berbagai sektor keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal (OJK, 2023).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari pedesaan terpencil dan masih menghadapi tantangan dalam hal akses ke layanan dan produk keuangan karena letak geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur serta rendahnya pendidikan (KOKP, 2023). Terbatasnya akses terhadap layanan dan produk keuangan ini, membuat masyarakat di daerah pedesaan mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan mereka, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kemiskinan. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022, mayoritas desa di NTT masih berada dalam

klasifikasi Berkembang dan Tertinggal, yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa (KOKP, 2023).

Desa Oefeto di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditetapkan sebagai *pilot project* pelaksanaan program ini. Desa Oefeto dipilih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi NTT dengan kriteria meliputi kesiapan komunitas setempat dan peluang ekonomi yang tersedia. Kehadiran program EKI diharapkan dapat menjawab kendala geografis, rendahnya literasi keuangan, serta keterbatasan infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan utama inklusi keuangan di pedesaan. Untuk memastikan bahwa Program EKI yang diimplementasikan oleh OJK NTT di desa benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat, diperlukan suatu pengukuran efektivitas yang komprehensif.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang program peningkatan inklusi keuangan dan literasi keuangan dengan berbagai hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2020) membahas tentang efektivitas program edukasi dan religiusitas dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah yang dilakukan pada mahasiswa PTN/PTS di Jawa Tengah yang telah mengikuti program edukasi ekonomi/keuangan syariah secara formal maupun non formal. Program tersebut efektif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah yang ada. Selain itu, terdapat penelitian tentang evaluasi dampak program EKI terhadap inklusi keuangan yang telah dilakukan terdahulu. Penelitian yang dilakukan Saputri & Harianto (2024) membahas tentang analisis diskriminan pada program EKI terhadap inklusi keuangan pada desa Ngampungan, Jombang, yang merupakan desa sasaran program OJK. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya peningkatan signifikan dalam indeks inklusi keuangan di Desa Ngampungan setelah implementasi program EKI.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk meneliti efektivitas program EKI di NTT untuk menilai sejauh mana program ini berhasil meningkatkan inklusi keuangan di pedesaan khususnya di Desa Oefeto. Evaluasi ini penting untuk memahami dampak dari program terhadap peningkatan akses ke layanan keuangan, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung implementasi program EKI di lapangan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan program di masa mendatang, sehingga inklusi keuangan di NTT dapat terus meningkat dan lebih menjangkau lebih banyak masyarakat serta akses keuangan yang merata..

## **KAJIAN TEORI**

### **Efektivitas**

Kata dasar dari efektivitas adalah efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan efektif sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh, dapat membuahkan hasil, dan efisien. Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan spesifik yang diinginkan, termasuk dampak yang nyata bagi kelompok sasaran (Harder & Chu, 2020). Tingkat efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan rencana dan target yang telah ditetapkan dengan pencapaian hasil. Suatu pekerjaan dinyatakan efektif jika hasilnya sesuai dengan rencana dan target, sedangkan dinyatakan tidak efektif jika

hasil yang dicapai tidak sejalan dengan yang direncanakan. Menilai suatu kriteria efektivitas program mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690-900.327 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

**Tabel 2.**

Standar Capaian Efektivitas Program

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
100	Sangat Efektif
80-99,99	Efektif
60-79,99	Cukup Efektif
40-59,99	Kurang Efektif
Di bawah dari 40	Tidak Efektif

Sumber : *Keppmendagri No.690.900.327*

Efektivitas program merujuk pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai, mencerminkan tingkat keberhasilan dalam merealisasikan (Norsanti, 2021). Artinya bahwa, efektivitas dapat diukur melalui indikator-indikator yang menunjukkan pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam konteks inklusi keuangan, efektivitas sebuah program merujuk pada sejauh mana layanan keuangan dapat diakses oleh masyarakat pedesaan yang sebelumnya tidak terlayani.

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas sebuah program. Menurut Hasibuan (2014) faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam efektivitas program, antara lain:

1. Kualitas Aparatur
2. Kompetensi Administrator
3. Pengawasan
4. Kerjasama

Ukuran efektivitas merujuk pada metode atau kriteria yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu tindakan, program, atau organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Campbell (2019) terdapat beberapa indikator evaluasi efektivitas suatu program, yaitu:

1. Keberhasilan Program : Keberhasilan program merujuk sejauh mana program dapat memberikan hasil yang diinginkan serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan, baik dari aspek kualitas, efisiensi, maupun dampaknya terhadap masyarakat.
2. Keberhasilan Sasaran : Program dianggap efektif jika sasaran yang dituju mendapatkan manfaat sesuai dengan yang direncanakan.
3. Kepuasan terhadap Program : Kepuasan terhadap program adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh sasaran atau target dari program terhadap berbagai aspek program, seperti kualitas layanan, kesesuaian dengan kebutuhan, dan dampak yang dirasakan.
4. Tingkat *Input* dan *Output* : Tingkat *input* dan *output* artinya membandingkan sumber daya yang digunakan (*input*) dengan hasil atau dampak yang dicapai (*output*).
5. Pencapaian Tujuan : Merujuk pada sejauh mana program berhasil mencapai hasil akhir yang telah dirancang.

### **Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI)**

Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) adalah inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat desa secara berkelanjutan dengan fokus pada potensi lokal seperti sumber daya alam, budaya, sosial, dan finansial (OJK, 2023). Program EKI dilaksanakan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa, yang

mana pemberdayaan ini melibatkan beberapa *stakeholder* diantaranya Pemerintah, akademisi, media, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dan komunitas. Beberapa tujuan program EKI berdasarkan OJK yaitu:

1. Meningkatkan akses keuangan masyarakat
2. Mengoptimalkan potensi lokal
3. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan
4. Mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi
5. Membantu pemerataan akses keuangan
6. Mempercepat transformasi digital
7. Mengurangi ketimpangan literasi dan inklusi keuangan

Dalam pelaksanaannya, program EKI mengadopsi tiga tahap yaitu:

1. Pra-inkubasi

Pada tahap ini, dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap potensi desa dengan fokus pada tiga aspek utama antara lain : a) Fisik, yaitu kondisi infrastruktur desa seperti akses jalan, konektivitas, dan fasilitas umum yang tersedia; b) Sosial, berhubungan dengan struktur sosial masyarakat termasuk pola kerja, budaya, dan tingkat partisipasi komunitas; c) Finansial, berhubungan dengan sumber daya keuangan masyarakat seperti akses terhadap bank, koperasi, atau *fintech*, serta kebiasaan keuangan masyarakat. Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan spesifik desa dan merancang strategi yang tepat sasaran.

2. Inkubasi

Tahap ini merupakan inti dari proses pemberdayaan masyarakat yang melibatkan a) Pelatihan literasi keuangan, berupa edukasi tentang layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi agar masyarakat memahami cara mengelola keuangan secara optimal; b) Penggunaan teknologi digital, yaitu dengan memberikan pelatihan terkait penggunaan alat pembayaran digital seperti QRIS dan aplikasi *fintech* untuk mempermudah transaksi keuangan di daerah yang terjangkau jaringan internet; c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, meliputi pelatihan keterampilan untuk mengelola produk lokal, seperti pengolahan hasil pertanian. Tahap ini dilakukan secara intensif oleh lembaga keuangan dan mitra terkait seperti bank dan koperasi.

3. *Pasca*-inkubasi

Tahap ini berfokus pada implementasi produk keuangan dan pengukuran hasil, dengan kegiatan utama meliputi a) Penggunaan mandiri produk keuangan, dimana masyarakat didorong untuk memanfaatkan layanan keuangan secara mandiri, seperti pinjaman mikro, tabungan, dan asuransi; b) Evaluasi hasil program, yaitu mengukur sejauh mana inklusi keuangan meningkat di desa setelah program dijalankan. Evaluasi ini mencakup dampak pada peningkatan akses keuangan, literasi, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## **Inklusi Keuangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 mendefinisikan inklusi keuangan adalah ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Inklusi keuangan merupakan alat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan inklusi keuangan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan akses yang luas dan merata terhadap berbagai produk dan

layanan jasa keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Inklusi keuangan merupakan alat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan inklusi keuangan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan akses yang luas dan merata terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Amalia (2023) tujuan inklusi keuangan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, antara lain:

1. Mengurangi ketimpangan ekonomi  
Inklusi keuangan berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan menyediakan akses keuangan yang merata bagi semua kelompok masyarakat sehingga kesenjangan antara kelompok dengan pendapatan tinggi dan rendah dapat diminimalkan.
2. Meningkatkan Kesejahteraan sosial  
Pemberian akses layanan keuangan kepada masyarakat dapat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan memiliki akses yang lebih baik ke layanan keuangan dan masyarakat dapat mengelola keuangan mereka secara lebih efektif.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi  
Inklusi keuangan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan individu dan usaha kecil akses yang lebih luas ke modal melalui kredit dan layanan keuangan.
4. Meningkatkan keamanan finansial  
Pengetahuan finansial yang memadai memungkinkan seseorang untuk lebih memahami risiko keuangan dan cara melindungi aset mereka, sehingga meningkatkan keamanan finansial.
5. Membangun stabilitas ekonomi  
Dengan beralih ke sistem keuangan formal, masyarakat mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi informal, seperti penipuan atau kehilangan uang tanpa perlindungan hukum sehingga akan membangun stabilitas ekonomi yang baik.

Indikator inklusi keuangan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat akses dan pemanfaatan layanan keuangan oleh individu serta masyarakat. Menurut Latifah (2022) terdapat beberapa indikator inklusi keuangan, antara lain:

1. *Product Holding* (Kepemilikan Produk)  
*Product holding* merujuk pada kepemilikan produk keuangan oleh individu atau rumah tangga, yang menunjukkan sejauh mana masyarakat menggunakan layanan keuangan yang tersedia. *Product holding* mencakup beberapa aspek utama, yaitu: kepemilikan rekening tabungan dan dana pensiun, penggunaan fasilitas pembayaran, kepemilikan terhadap asuransi, serta akses terhadap pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan.
2. *Product Awareness* (Kesadaran Produk)  
*Product awareness* adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk dan layanan keuangan yang ada, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan produk tersebut.
3. *Product Choice* (Pilihan Produk)  
*Product choice* mencakup kemampuan individu untuk memiliki produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, yang mencerminkan keberagaman dan aksesibilitas produk keuangan.

#### 4. Ketersediaan Akses

Akses yang mencakup keberadaan infrastruktur keuangan, seperti kantor cabang bank, ATM, agen layanan keuangan, serta *platform digital* yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara efektif.

### **Literasi Keuangan**

OJK mendefinisikan literasi keuangan sebagai ilmu, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap serta perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat (OJK, 2022). Literasi keuangan didefinisikan sebagai tingkat pemahaman seseorang atau masyarakat tentang bagaimana mereka mengelola keuangan mereka secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan situasi ekonomi mereka (Septiani & Wuryani, 2020). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan yang meliputi pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan diri dalam mengelola keuangan secara cerdas dan efisien.

Tingkat literasi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) dibagi menjadi empat kategori utama, yang mencerminkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengelola produk dan layanan keuangan. Berikut adalah tingkatan dalam literasi keuangan:

#### 1. *Well Literate*

Kelompok masyarakat ini telah memiliki pemahaman yang baik serta keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk keuangan yang tersedia. Mereka memahami secara mendalam fitur, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan produk dan layanan keuangan. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan dengan efektif.

#### 2. *Sufficient Literate*

Kelompok ini memiliki pemahaman dan keyakinan mengenai lembaga jasa keuangan serta berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajibannya. Namun, mereka belum memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan produk dan jasa keuangan tersebut secara efektif. Meskipun golongan ini memahami konsep dasar keuangan dan mengetahui pilihan yang tersedia, mereka masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

#### 3. *Less Literate*

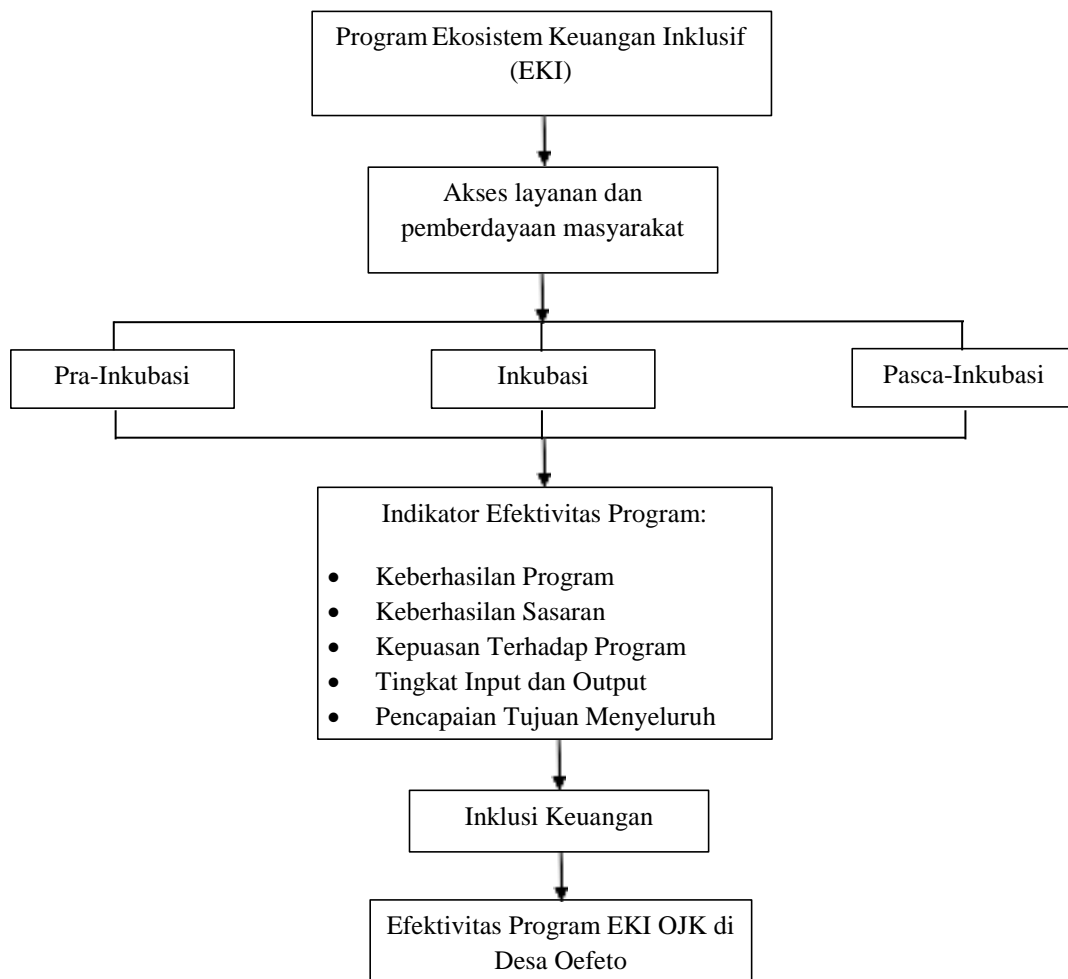
Kelompok ini hanya memiliki pemahaman dasar mengenai lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan keuangan yang tersedia. Meskipun mereka mengetahui keberadaan institusi keuangan seperti bank, asuransi, dan investasi. Pemahaman mereka masih terbatas pada informasi umum tanpa memiliki keyakinan yang kuat terhadap manfaat, cara penggunaannya, dan risiko.

#### 4. *Not Literate*

Kelompok ini tidak memiliki pemahaman atau kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan keuangannya. Selain itu, mereka juga tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan tersebut. Kelompok ini cenderung tidak menggunakan layanan keuangan formal, mereka lebih mengandalkan metode tradisional dalam mengelola keuangan, seperti menyimpan uang tunai di rumah atau meminjam dari kerabat daripada menggunakan layanan perbankan.

## Kerangka Berpikir

Inklusi keuangan adalah salah satu prioritas utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah dan akses terbatas terhadap layanan keuangan. Masyarakat pedesaan di NTT menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi. Tantangan-tantangan seperti kesenjangan literasi dan inklusi keuangan, tingginya angka kemiskinan, serta keterbatasan akses. Program EKI adalah inisiatif OJK yang dirancang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut melalui pendekatan edukasi keuangan, peningkatan aksesibilitas, dan kemitraan strategis. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka, membuka peluang ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Untuk menilai efektivitas program EKI, maka digunakan indikator antara lain keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, serta pencapaian tujuan menyeluruh.



**Gambar 1.**  
Kerangka Berpikir

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Creswell & Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada penggambaran mendetail dari fenomena tertentu berdasarkan data yang dikumpulkan, tanpa mencoba mengubah atau memanipulasi kondisi yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah 7 informan yang terdiri dari staf supervisor OJK, kepala desa, dan masyarakat desa Oefeto. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data yang berhasil dikumpul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian di analisis dengan menggunakan analisis reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan baik itu wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mengambil beberapa poin penting terkait dengan efektivitas program EKI OJK Provinsi NTT dalam meningkatkan inklusi keuangan di pedesaan yang mencakup lima indikator, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, serta pencapaian tujuan. Kelima indikator ini menjadi landasan dalam melihat sejauh mana program EKI berhasil meningkatkan inklusi keuangan di Desa Oefeto, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila dianalisis berdasarkan indikator-indikator tersebut, hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.7.

**Tabel 3.**

Ketercapaian Indikator Efektivitas Program

Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Efektivitas Program
Keberhasilan Program	7	6	85,72%	Efektif
Keberhasilan Sasaran	7	5	71,43%	Cukup Efektif
Kepuasan terhadap Program	7	6	85,72%	Efektif
Tingkat <i>Input</i> dan <i>Output</i>	7	5	71,43%	Cukup Efektif
Pencapaian Tujuan	7	6	85,72%	Efektif
Total	35	28	400,02%	
<b>Rata-Rata</b>			<b>80%</b>	<b>Efektif</b>

Sumber: data primer diolah (2025)

Data dari Tabel 3. diatas diketahui bahwa pelaksanaan efektivitas program EKI di Desa Oefeto dilihat dari lima indikator dengan hasil rata-rata 80%, menunjukkan bahwa efektivitas dari program EKI dalam mendukung inklusi keuangan di Desa Oefeto dikatakan relatif efektif. Capaian ini mencerminkan bahwa secara umum program mampu memenuhi sebagian besar target implementasi. Dari sisi keberhasilan program, EKI berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Masyarakat Desa Oefeto menunjukkan antusiasme mereka melalui keterlibatan dalam mengikuti sosialisasi serta kesadaran untuk menggunakan produk keuangan.

Sasaran utama program EKI adalah masyarakat Desa Oefeto. Dari wawancara yang dilakukan, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa program ini memberikan manfaat

langsung, terutama dalam memperoleh akses kredit tanpa agunan dan edukasi keuangan. Kredit Merdeka memberikan solusi pembiayaan tanpa bunga kepada pelaku usaha lokal yang sebelumnya kesulitan mendapatkan modal. Selain itu, pelibatan pelajar dalam program tabungan SimPel juga menunjukkan bahwa program menasar generasi muda sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang melek finansial. Temuan di Desa Oefeto ini, peneliti menyimpulkan bahwa para pelaku usaha sangat terbantu dengan pembiayaan ini, sedangkan orang tua pelajar mengapresiasi edukasi keuangan yang diterima anak-anak mereka. Dengan demikian, sasaran program telah tercapai sesuai dengan rencana awal.

Berdasarkan aspek kepuasan terhadap program, peneliti dapat melihat dan menyimpulkan bahwa masyarakat menunjukkan respons positif terhadap program. Mereka lebih percaya diri dalam menggunakan layanan keuangan formal dan menyatakan bahwa akses ke produk keuangan menjadi lebih mudah. Selain itu, melalui pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan membantu mereka dalam memahami cara mengelola keuangan rumah tangga dan usaha secara lebih bijak, meskipun masih ada masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan prosedur bank. Dari sisi tingkat *input* dan *output* program. Dari *input*, OJK melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti BRI, PNM, Bank NTT, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan layanan keuangan. *Output* dari program EKI berupa peningkatan kepemilikan rekening dan akses pembiayaan usaha kecil.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Oefeto dan melakukan pengamatan ditemukan bahwasannya masyarakat mulai memahami pentingnya legalitas lembaga keuangan dan cenderung menghindari pinjaman dari lembaga informal yang tidak diawasi oleh OJK. *Output* yang dihasilkan pun cukup positif. Dimana terdapat peningkatan penggunaan produk tabungan serta peminjaman modal usaha. Hasil ini mencerminkan efektivitas program dalam mendorong penggunaan layanan keuangan secara nyata. Namun, dari sisi *output* jangka panjang, program EKI masih memerlukan keberlanjutan agar benar-benar dapat mengubah perilaku keuangan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara nyata.

Pencapaian tujuan dari program EKI adalah peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta pengurangan ketimpangan akses keuangan. Berdasarkan indikator inklusi keuangan seperti *product holding* (kepemilikan rekening dan akses pinjaman), *product awareness* (pengetahuan masyarakat), dan ketersediaan akses, semua menunjukkan peningkatan. Dari hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyimpulkan bahwa program EKI berhasil menumbuhkan ekosistem inklusif berbasis potensi lokal serta membentuk kebiasaan keuangan sejak dini pada anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berhasil secara jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan dalam jangka panjang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pencapaian tujuan dari program EKI adalah peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta pengurangan ketimpangan akses keuangan. Berdasarkan indikator inklusi keuangan seperti *product holding* (kepemilikan rekening dan akses pinjaman), *product awareness*

(pengetahuan masyarakat), dan ketersediaan akses, semua menunjukkan peningkatan. Dari hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyimpulkan bahwa program EKI berhasil menumbuhkan ekosistem inklusif berbasis potensi lokal serta membentuk kebiasaan keuangan sejak dini pada anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berhasil secara jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan dalam jangka panjang.

Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat tantangan berupa rendahnya penggunaan mandiri layanan keuangan. Oleh karena itu, keberlanjutan pendampingan program menjadi hal yang sangat penting agar perubahan perilaku masyarakat tidak bersifat sementara. Pendampingan yang konsisten dan edukasi yang berkesinambungan diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kembali pada praktik pinjaman informal, melainkan semakin terampil dalam mengelola keuangan, memanfaatkan produk keuangan formal, serta membangun kemandirian ekonomi desa. Artinya, program EKI telah berjalan relatif efektif, tetapi keberlanjutannya perlu diperkuat dengan dukungan insentif.

### Saran

Bagi masyarakat, diharapkan terus memanfaatkan program EKI dengan lebih aktif, baik melalui tabungan, akses kredit, maupun edukasi keuangan yang diberikan. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan melalui partisipasi aktif dalam pelatihan atau edukasi yang diadakan sehingga budaya menabung dapat terbentuk serta ketergantungan pada praktik pinjaman informal dapat berkurang.

Bagi penelitian selanjutnya, menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed method* agar hasil penelitian lebih komprehensif dalam mengukur dampak program terhadap peningkatan inklusi keuangan.

### DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, N. (2023, September 3). *Inklusi Keuangan Adalah : Tujuan, Indikator, Manfaat & Caranya*. FAZZ. <https://fazz.com/id/newsroom/business/inklusi-keuangan/>
- Campbell, J. P. (2019). The Measurement of Organizational Effectiveness. In R. L. Kahn & N. M. Katz (Eds.), *Organizational Effectiveness: A Comparison of Multiple Models* (pp. 17–45). John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Book FIFTH EDITION : RESEARCH DESIGN (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches). In *SAGE* (Vol. 12, Issue 5). SAGE Publications. [https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod\\_resource/content/1/creswell.pdf](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf)
- Fuadah, I. S., Hindrayani, A., & Totaliia, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Rumah Tangga Dengan Jaringan Sosial (Network) Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11, 77–85. <https://doi.org/10.26740/jupe.v9n3.p77>
- Ghosh, S. (2020). Financial Inclusion in India: Does Distance Matter? *South Asia Economic Journal*, 21(2), 216–238. <https://doi.org/10.1177/1391561420961649>

- Harder, S. J., & Chu, E. S. (2020). Effectiveness of Care. In *The Patient and Health Care System: Perspectives on High-Quality Care* (pp. 123–135). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-46567-4\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-030-46567-4_10)
- Hasibuan, S. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi). Bumi Aksara.
- KOKP. (2023). *Term Of Reference (TOR) Ekosistem Keuangan Inklusif di Desa Oefeto, Kabupaten Kupang*.
- Latifah, D. (2022). *Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Pada Keberlangsungan Program Desa (Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunung karang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga)*. 1–23. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/15842>
- Mustofa, U. (2020). *Efektivitas Program Edukasi dan Religiositas Dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah*. 7(2), 214–231. <https://doi.org/10.31942/iq>
- Norsanti, N. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825>
- OJK. (2022). *Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- OJK. (2023). *Siaran Pers : Tingkatkan Akses Keuangan Masyarakat Desa, OJK Resmikan Program Ekosistem Keuangan Inklusif*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Tingkatkan-Akses-Kuangan-Masyarakat-Desa,-OJK-Resmikan-Program-Ekosistem-Kuangan-Inklusif/Siaran%20Pers%20Kick%20Off%20GM%20EKI,%20Nagari%20Sumpur.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-Masyarakat.aspx>
- Rohmayanti, S. A. A., Samsuri, A., & Fitrianto, A. R. (2021). Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur. *Muslim Heritage*, 6(2), 377–403. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3131>
- Saputri, I., & Harianto, E. (2024). Analisis Diskriminan pada Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Terhadap Inklusi Keuangan pada Desa Sasaran Program Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada Desa Ngampung, Jombang). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 2038–2050. <https://doi.org/10.38035/jmpis>
- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(8), 3214–3236. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i08.p16>

- Suryaningrum, D. A., Zulfikri, A., & Elisabeth, C. R. (2023). Peran Inklusi Keuangan dalam Pembangunan Ekonomi : Bukti dari Negara-Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 246–259. <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i03.537>
- World Bank. (2021). *World Bank Data on Indonesia Adult Populated Unbanked*. <https://digitalfinance.worldbank.org/country/indonesia>
- Yusri, M., Cemda, A. R., & Rangkuti, K. (2022). Inklusi Keuangan pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil dalam Pengembangan Wilayah Masyarakat Pedesaan di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 11(3), 884–893. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.7211>